KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP	:	W.16.KU.02.01- 5866
TGL. PEMBUATAN	:	05 JULI 2024
TGL. EFEKTIF	:	05 JULI 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP 197801141997031001
NAMA SOP	:	SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) PADA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	1. Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan pengelolaan barang milik negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara	2. Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan Pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 /PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara	
KETERKAITAN :	**PERALATAN /PERLENGKAPAN :**
Keterkaitan Kementerian/Lembaga di tingkat Wilayah :	1. Dokumen
1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak 2. Instansi Terkait	2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
Keterkaitan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat :	
1. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2. Kementerian Keuangan 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pengeolaan keuangan dan barang milik negara akan mengalami hambatan dalam prosesnya.	Disimpan sebagai Data Elektronik dan manual

ALUR USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

